

Kebijakan Alokasi Anggaran Kabupaten Selayar

Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah sistem pengelolaan keuangan sebagai realisasi dari kebijakan anggaran, yang menjamin adanya semangat efisiensi dan efektivitas anggaran, transparansi dan akuntabilitas publik, rasa keadilan masyarakat, serta pencapaian yang optimal. Akan tetapi, seringkali alokasi anggaran belum memperlihatkan adanya keseimbangan yang sehat antara anggaran pemerintah pusat di satu pihak dengan pemerintah daerah di lain pihak, sehingga menimbulkan kesenjangan secara vertikal yang sangat berpengaruh terhadap kinerja pembangunan secara keseluruhan. Seiring dengan otonomi daerah, semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas yang mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam proses kebijakan pengelolaan alokasi anggaran daerah, maka terpenuhinya azas keadilan dengan mempertimbangkan program prioritas dan terpenuhinya ruang lebih luas bagi peran serta masyarakat, perlu menjadi perhatian bersama dalam pengelolaan alokasi anggaran di Selayar.

A. PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya UU No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Daerah secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001, telah terjadi perubahan-perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Perubahan yang mendasar itu antara lain, teridentifikasi dari tersusunnya Rencana Strategis (Renstra), dan tersusunnya kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk melaksanakan Renstra tersebut, serta arah kebijakan umum yang bersifat strategis pada peningkatan sarana dan prasarana fisik yang dapat memperlancar roda perekonomian, peningkatan pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dapat memenuhi kebutuhan industrialisasi dan perdagangan yang semakin berkembang, termasuk pengembangan fungsi lembaga-lembaga perekonomian mikro yang berbasis pada sistem perekonomian rakyat. Mekanisme penyusunan kebijakan alokasi anggaran pembangunan merupakan suatu rangkaian tahapan aktivitas administrasi yang meliputi penyusunan Arah dan Kebijakan Umum APBD, penyusunan Strategi dan Prioritas APBD, penyusunan Rencana Program dan Kegiatan, penerbitan Surat Edaran, penyusunan Pernyataan Anggaran, dan penyusunan Rancangan Anggaran Daerah. Rangkaian aktivitas ini terjadi dalam dinamika hubungan antar lembaga yang secara teknis dilaksanakan oleh Tim Anggaran Eksekutif dan Panitia Anggaran Legislatif. Faktor sumber daya aparatur Pemerintahan dan anggota Legislatif Daerah merupakan faktor determinan dalam proses penyusunan kebijakan alokasi anggaran pembangunan. Faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi proses penyusunan kebijakan alokasi anggaran pembangunan adalah kebutuhan dan permasalahan daerah, terutama kebutuhan dan

permasalahan di bidang pendidikan, perekonomian dan sumber daya aparatur; potensi sosial dan potensi perekonomian masyarakat, strategi dan arah kebijakan pembangunan, program strategis pada masing-masing unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar, pelaku-pelaku ekonomi daerah, dan lembaga swadaya masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah telah memperpendek rentang birokrasi yang selama ini sebagian besar dikendalikan oleh Pemerintah Pusat. Kewenangan yang diberikan merupakan suatu upaya pemerintah dalam mempercepat distribusi pembangunan di berbagai wilayah. Dengan demikian, permasalahan sosial ekonomi masyarakat yang spesifik lokal dapat langsung dibuat solusi pemecahannya oleh Pemerintah Daerah (Pemda) yang bersangkutan. Manfaat dari kebijakan otonomi daerah diikuti oleh adanya tantangan yang harus diatasi oleh Pemda. Tantangan yang dimaksud antara lain dengan dilepaskannya beberapa kebijakan departemen yang sebelumnya ditangani oleh Pemerintah Pusat, sekarang harus diatasi oleh Pemerintah Daerah.

Sebagaimana diketahui, masalah yang dihadapi oleh suatu pemerintahan adalah bagaimana pemerintahan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut dapat ditempuh melalui optimalisasi kegiatan ekonomi. Optimalisasi kegiatan ekonomi diupayakan dengan mengelola secara efisien segala sumberdaya yang dimiliki oleh daerah tersebut. Fungsi pemerintah sebagai regulator ekonomi adalah mengupayakan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki oleh daerah untuk menggerakkan ekonomi agar pendapatan masyarakat meningkat secara optimal dan merata. Untuk menjalankan fungsinya sebagai regulator kebijakan ekonomi, Pemerintah Daerah memerlukan anggaran pembangunan daerah yang memadai. Kenyataannya, ketersediaan anggaran belanja pembangunan yang dimiliki oleh suatu daerah relatif terbatas, sehingga diperlukan suatu perencanaan dan kebijakan penyaluran anggaran yang tepat sasaran. Melalui manajemen pengalokasian anggaran secara optimal ke dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan, seharusnya kegiatan ekonomi daerah akan lebih cepat tumbuh dan dampak pendapatannya dapat dinikmati oleh masyarakat luas.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yakni Dinas, Badan atau Kantor Daerah yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan pembangunan daerah, seharusnya berfungsi optimal. Kenyataannya, sering ditemui bahwa penyaluran anggaran pembangunan daerah melalui SKPD kurang proporsional dengan tugas dan wewenang dinas/instansi tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga dampak dari kegiatan dinas/instansi menjadi tidak optimal manfaatnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara teori, penyaluran anggaran yang tepat kepada sektor-sektor ekonomi unggulan akan mampu mendorong kegiatan ekonomi daerah. Disamping itu, penyaluran anggaran yang tepat juga akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu metode yang dapat menunjukkan kegiatan sektor-sektor ekonomi unggulan adalah melalui analisis dampak perkembangan sektor ekonomi terhadap kegiatan sektor ekonomi lainnya terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Sementara itu, permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah adalah tidak adanya pedoman baku dalam pengalokasian anggaran. Anggaran yang diterima SKPD di wilayah selama ini cenderung berdasarkan kebiasaan masa lalu sehingga seringkali menimbulkan pertanyaan, apakah komposisi anggaran yang dialokasikan kepada setiap SKPD tersebut merupakan komposisi yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat? Penelitian ini dimaksudkan untuk merumuskan alternatif komposisi pengalokasian anggaran yang optimal untuk SKPD di wilayah pemerintahan Kabupaten Selayar yang rumusannya dilakukan dengan prinsip pemerintahan yang baik dan akuntabel yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Kenyataannya sangat sedikit, jika ada, pejabat pemerintah daerah terpilih akan memperbolehkan dilakukannya analisis terstruktur alternatif kebijakan atau masalah administrasi oleh profesional teknis untuk membuat keputusan untuk mereka. Hal ini terjadi karena proses yang telah dikembangkan untuk menangani perbandingan interpersonal dalam pemerintah bukan urusan ekonomi tetapi lebih ditentukan oleh kepentingan politik, demikian pendapat Wildavsky (1961).¹ Memang Wildavsky memfokuskan pada tingkat nasional, di mana terdapat tawar menawar politik, struktur pengambilan keputusan terfragmentasi, sistem administrasi yang lemah, dan kenaikan politik yang ditandai proses alokasi sumber daya tampaknya menghalangi suara yang kuat untuk analisis terstruktur. Namun demikian, penerapan teknik analisis bagi perusahaan pelayanan publik memungkinkan administrator profesional untuk mempengaruhi dan menginformasikan perkembangan kebijakan substantif dan struktur sistem pelayanan.

Dalam penelitian ini juga diuraikan tentang simulasi kebijakan dengan mengalokasikan anggaran kepada dinas/instansi daerah. Adapun ruang lingkup penelitian yang dilakukan, secara rinci adalah: (1) mengklasifikasikan tugas dan wewenang SKPD dibawah Pemerintah Daerah menjadi kegiatan ekonomi, non ekonomi, dan penunjang; (2) mengklasifikasi tugas/wewenang SKPD teknis yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi melalui kontribusi sektor yang menjadi

¹ Wildavsky, Aaron. 1961. "Political Implications of Budgetary Reform." Public Administration Review, 21 (Autumn): 183-190.

wewenangnya dalam meningkatkan kegiatan sektor ekonomi lainnya, kemampuan meningkatkan lapangan pekerjaan dan kemampuan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui analisis *backward* dan *forward* model *input-output*²; (3) mengklasifikasi tugas dan wewenang SKPD di bawah Pemda yang aktivitasnya tidak berkaitan dengan kegiatan ekonomi dengan membangun basis *scoring* peran institusinya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakatnya; dan (4) memproporsikan SKPD di bawah pemerintah daerah berdasarkan perpaduan penilaian yang proporsional antara peran pengembangan ekonomi dan non ekonomi.

B. ALOKASI ANGGARAN

Pengalokasian anggaran erat kaitannya dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada bagian ini akan dijelaskan pengertian pemerintah, anggaran itu sendiri, proses peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan metodologi *input-output* untuk analisis penggandaan ekonomi sehingga Pemda dapat memilih kebijakan sektoral yang paling efisien.

Belanja Daerah sebagai komponen anggaran adalah pengeluaran yang dilakukan oleh Pemda untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam satu tahun tertentu. Dalam perencanaan dan pelaksanaannya, keberadaan pengeluaran ini tidak berdiri sendiri, melainkan bersamaan dengan adanya penerimaan atau pendapatan. Proses perencanaan, pelaksanaan dan kemudian pengawasan terhadap pendapatan dan belanja ini tidak lain merupakan kegiatan penganggaran di lingkungan Pemda. Oleh karena itu hasil dari proses perencanaan yang dijadikan pedoman bagi pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pemerintahan di daerah disebut sebagai anggaran Pemda yang dalam konteks administrasi pemerintahan di Indonesia lazim disebut sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Fungsi Anggaran bagi Pemda dan Masyarakat

Dalam kaitannya dengan kegiatan pemerintahan, APBD merupakan sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintah di daerah dalam rangka desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

² United Nations. 1999. *Handbook of Input-Output Table - Compilation and Analysis*. Studies in Methods Series F, No. 74, New York. p. 250

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Berdasarkan UU No. 22/1999 dan UU No.25/1999, maka sebuah kabupaten/kota sebagai daerah otonom memiliki wewenang untuk menentukan APBD-nya sendiri. APBD yang ditentukan ini digunakan untuk mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mengurus kepentingan masyarakat tidak lain merupakan tugas Pemda. Sedangkan aspirasi masyarakat direpresentasikan oleh suara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Karena diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat, maka APBD yang disusun harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Secara konseptual, Musgrave (1989)⁴ menyebutkan bahwa sebuah anggaran pemerintah harus memenuhi fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi alokasi dapat berjalan dengan baik jika anggaran yang ada digunakan untuk penyediaan barang dan jasa publik yang tepat bagi masyarakat. Untuk suatu daerah, melalui fungsi alokasi ini anggaran digunakan untuk penyediaan barang publik yang tepat bagi masyarakat di daerah tersebut. Barang publik di sini harus dibedakan pengertiannya dengan barang pribadi (privat).

Sullivan (2000)⁵ menyebutkan tentang tiga karakteristik utama dari barang publik di suatu daerah (*local public goods*), yaitu: (1) tidak ada saling benturan (*nonrivalrous*) dalam mengkonsumsi; (2) tidak ada pengecualian (*nonexcludable*) dalam penggunaannya, dan (3) manfaat dari barang tersebut hanya terbatas pada daerah yang bersangkutan. Tidak ada benturan dalam konsumsi dapat diartikan bahwa barang tersebut dapat dikonsumsi secara bersama-sama (*joint consumption*) pada saat yang sama. Kenikmatan mengonsumsi barang tersebut bagi seseorang tidak berkurang, meskipun pada saat yang sama datang orang lain yang ikut mengonsumsi berapa pun banyaknya orang lain yang datang tersebut. Sebagai contoh Pemda menyelenggarakan siaran lagu lewat stasiun radio yang dimilikinya. Setiap orang dapat menikmati siaran lagu tersebut lewat pesawat radionya masing-masing tanpa berkurang kenikmatannya, meskipun banyak orang yang juga menikmati siaran lagu tersebut.

Dalam kenyataan, tidak semua barang publik memiliki sifat tidak ada benturan dalam konsumsi secara mutlak. Sebagian barang publik bersifat setengah ada benturan (*semirivalrous*). Ini disebabkan barang publik tersebut memiliki keterbatasan kapasitas konsumen. Misalnya, lapangan olah raga, gedung

³ Undang-undang No.22/1999 dan Undang-undang No.25/1999.

⁴ Richard A. Musgrave & Peggy Musgrave, *Public Finance in Theory and Practice*, New York, McGraw Hill, 5th edition, 1989.

⁵ A. Sullivan, *Urban Economics*, Boston:Irwin McGraw-Hill, 2000.

pertemuan, taman, dan lain-lain. Jika sebuah taman yang dibangun Pemda memiliki kapasitas 50 orang, maka kedatangan orang ke 51 akan mengganggu kenikmatan pengunjung sebelumnya, apalagi kedatangan orang ke 52, 53, 54, dan seterusnya.

Tidak ada pengecualian (*nonexcludable*) berarti bahwa semua orang boleh menggunakan barang publik tanpa kecuali. Seperti taman yang dicontohkan di atas, semua warga masyarakat pada dasarnya diperbolehkan menikmati taman tersebut. Namun demikian, tidak semua barang publik secara mutlak bersifat tidak ada pengecualian, sebagian bersifat setengah ada pengecualian. Jika terhadap taman di atas dikenakan karcis masuk bagi pengunjungnya, maka hanya masyarakat yang membeli karcis saja yang boleh masuk ke taman (meskipun pada prinsipnya semua boleh masuk).

Sementara itu, barang publik daerah hanya terbatas untuk kepentingan masyarakat di daerah tersebut, artinya Pemda hanya memiliki kewajiban menyediakan barang publik untuk masyarakatnya sendiri. Barang publik yang lebih luas jangkauan geografisnya menjadi kewajiban pemerintah yang lebih tinggi hirarkinya. Sebagai contoh penyelenggaraan keamanan nasional merupakan tanggungjawab Pemerintah Pusat.

Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa pemerintah yang harus menyediakan barang publik? Hal ini disebabkan karena barang publik tersebut tidak mungkin disediakan oleh produsen kepada konsumen melalui suatu mekanisme pasar. Jika diserahkan kepada pasar, maka produsen akan menjual produknya kepada konsumen yang mau membayar paling tinggi. Jika ada konsumen yang mau membayar dengan harga paling tinggi, tentu dia tidak akan mau berbagi barang tersebut dengan orang lain, sehingga barang tersebut nantinya akan menjadi barang pribadi (*privat*), bukan lagi barang publik yang bersifat *nonrivalrous* dan *nonexcludable*. Di sinilah sering dikatakan bahwa terjadi kegagalan mekanisme pasar dalam penyediaan barang publik. Oleh karena itu, barang publik harus disediakan oleh pemerintah.

Fungsi distribusi dimaksudkan sebagai fungsi anggaran dalam mengurangi kesenjangan antara kelompok kaya dengan kelompok miskin dalam masyarakat. Tanpa kebijakan apapun dari pemerintah maka sudah barang tentu aliran kekayaan dalam masyarakat akan menuju kepada para pemilik faktor produksi dan ini akan berlangsung secara terus menerus karena adanya proses akumulasi modal. Semakin besar faktor produksi maka aliran kekayaannya akan semakin cepat dan besar, dan semakin kecil kepemilikan faktor produksi akan semakin kecil dan lambat pula aliran kekayaan yang mereka peroleh. Bila ini dibiarkan terus, maka akan terjadi kesenjangan pendapatan yang sangat besar dalam masyarakat.

APBD merupakan salah satu alat dalam kebijakan Pemerintah Daerah untuk mengurangi kesenjangan pendapatan tersebut. Kebijakan yang dilakukan melalui APBD lazim disebut sebagai kebijakan fiskal. Melalui APBD, Pemda dapat mengenakan pajak kepada kelompok kaya untuk ditransfer kepada kelompok miskin, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Alternatif pendistribusian kembali pendapatan masyarakat menurut Musgrave (1989)⁶ dapat dilakukan secara langsung melalui cara: (1) pengenaan pajak progresif terhadap kelompok kaya yang kemudian disubsidikan langsung kepada kelompok miskin; (2) pajak progresif yang digunakan untuk membiayai jasa publik, khususnya untuk perumahan rakyat yang ditinggali kaum miskin; (3) pengenaan pajak pada barang-barang yang dikonsumsi sebagian besar kelompok kaya dan pemberian subsidi harga pada barang-barang kebutuhan pokok kelompok miskin.

Fungsi stabilisasi dari anggaran biasanya dikaitkan dengan ukuran-ukuran ekonomi makro yang ingin dicapai oleh Pemda yang dianggap dapat memperbaiki (mempertahankan) stabilitas ekonomi di wilayahnya. Dalam hal ini melalui APBD, Pemda misalnya, menetapkan target pengurangan jumlah pengangguran, laju inflasi yang dapat ditoleransi, pertumbuhan ekonomi yang realistis, dan sebagainya. Dalam hal ini Pemda dapat meningkatkan pengeluarannya pada sektor-sektor yang memiliki pengganda tinggi terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, atau dapat pula dilakukan pengurangan pajak daerah untuk kegiatan ekonomi yang baru tumbuh yang diperkirakan akan menyerap banyak tenaga kerja.

Sumber-sumber Pendapatan

Mengacu pada UU No. 25/1999, maka dalam pelaksanaan desentralisasi, Pemda dapat menggali pendapatan (penerimaan) dari sumber-sumber: (1) Pendapatan Asli Daerah; (2) Dana Perimbangan; (3) Pinjaman Daerah; dan (4) Lain-lain Penerimaan yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diusahakan oleh Pemda dari sumber-sumber di daerahnya sendiri yang terdiri dari: (a) pajak daerah; (b) retribusi; (c) hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sementara itu, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan

⁶ Richard A. Musgrave & Peggy Musgrave, *Public Finance in Theory and Practice*, New York, McGraw Hill, 5th edition, 1989.

terdiri dari: (a) bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan penerimaan dari sumberdaya alam; (b) Dana Alokasi Umum (DAU); dan (c) Dana Alokasi Khusus (DAK). DAU dialokasikan dari APBN dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sedangkan DAK dialokasikan untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang menyebabkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.

Menyangkut masalah alokasi belanja daerah, dari praktik yang telah dilakukan selama ini, pengeluaran daerah pada umumnya meliputi Belanja Urusan Wajib dan Belanja Urusan Pilihan. Kemudian belanja dari masing-masing urusan berasal dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Sedangkan urusan wajib dan urusan pilihan dijabarkan melalui SKPD-SKPD pelaksana kegiatan, antara lain di bidang: (1) Pertanian; (2) Industri; (3) Kesehatan; (4) Pendidikan; dan (5) Sosial.

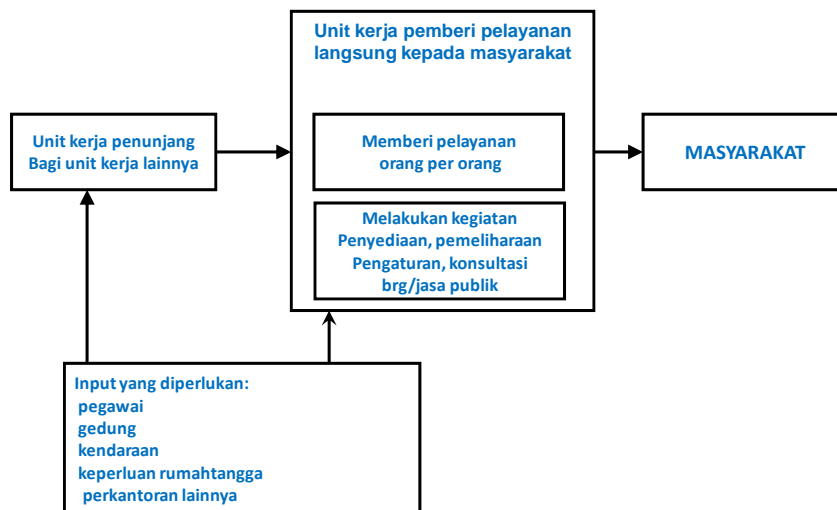
C. VARIABEL ALOKASI ANGGARAN

Untuk membuat alokasi anggaran pada setiap institusi perlu dibuat pengelompokan secara khusus, yang dapat menggambarkan pola pelayanan institusi tersebut kepada masyarakat. Pengelompokan ini diperlukan untuk menentukan variabel-variabel yang sesuai dalam pengalokasian anggaran. Dengan variabel-variabel yang sudah ditentukan tersebut kemudian dihitung koefisien alokasi anggaran yang diterapkan pada setiap institusi daerah di Kabupaten Selayar. Seperti telah disebutkan di muka, melalui anggaran, Pemda menjalankan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi. Ketiga fungsi tersebut diperlukan Pemda dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, yakni berupa penyediaan dan pemeliharaan barang dan jasa publik (fungsi alokasi), penarikan pajak dan retribusi (fungsi distribusi), dan pembuatan regulasi untuk stabilitas ekonomi daerah (fungsi stabilisasi).

Agar pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara efektif dan efisien, maka dibentuklah SKPD daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. SKPD daerah ini dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu: (1) SKPD yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat; dan (2) SKPD yang tidak melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat, akan tetapi berfungsi memberikan dukungan kepada SKPD pemberi pelayanan langsung. Gambaran yang lebih rinci tampak pada gambar 1.

Untuk melakukan semua kegiatannya, setiap institusi memerlukan input (sumberdaya) yang harus ada dalam sebuah institusi. Sumberdaya tersebut adalah pegawai, kendaraan, gedung dan berbagai kebutuhan rumah tangga perkantoran lainnya. Perbedaan jenis dan fungsi institusi berakibat pada perbedaan jumlah input yang diperlukan. Perbedaan tersebut juga berakibat pada perbedaan rentang manajerial, perbedaan jumlah pelayanan langsung kepada masyarakat dan perbedaan pengaruh langsung pada perekonomian daerah. Besarnya input yang diperlukan, rentang manajerial, jumlah pelayanan langsung kepada masyarakat dan pengaruh pada perekonomian daerah tersebut dapat menjadi faktor yang menentukan kebutuhan anggaran setiap institusi.

Gambar 1. Pengelompokan Institusi Daerah dalam Melayani Masyarakat



Dengan mempertimbangkan faktor-faktor: input yang harus ada dalam institusi, jumlah pelayanan langsung kepada masyarakat, rentang manajerial, dan pengaruh terhadap peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat, maka dapat diidentifikasi ukuran alokasi anggaran kepada setiap institusi. Ukuran alokasi anggaran ini dapat digunakan untuk menelusuri indikator-indikator (variabel-variabel) operasional yang dipakai dalam menentukan alokasi anggaran.

Input yang Harus Ada dalam Institusi

Setiap institusi dalam memberikan pelayanan memerlukan berbagai input yang relatif tetap. Beban kerja yang relatif tetap tersebut harus dibiayai dari dana APBD. Semakin berat biaya yang ditanggung semakin besar pula anggaran yang

mesti dialokasikan. Sedangkan variabel-variabel yang dapat dipakai untuk menentukan besar kecilnya biaya input tersebut adalah jumlah pegawai, jumlah kendaraan, luas bangunan dan biaya rumah tangga perkantoran lainnya.

Pelayanan kepada Masyarakat

Sementara itu, karena sebagian institusi memiliki fungsi sosial, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka pelayanan yang diberikan sifatnya tidak mencari keuntungan. Untuk itu perlu adanya alokasi anggaran untuk kegiatan pelayanan tersebut. Semakin luas jangkauan pelayanan yang diberikan, semakin besar pula anggaran yang diperlukan. Oleh karena itu, jumlah pelayanan per tahun yang diberikan kepada masyarakat luas dapat dijadikan variabel untuk menghitung alokasi anggaran kepada suatu institusi. Sedangkan variabel yang dapat dipakai adalah jumlah orang yang dilayani dan jumlah penerimaan PAD yang ditangani.

Rentang Manajerial

Setiap institusi mempunyai fungsi manajerial yang berbeda-beda dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Oleh karena itu kelembagaan yang seperti ini perlu memperoleh alokasi anggaran yang memadai. Variabel yang dapat dipakai untuk menentukan besarnya rentang manajerial ini adalah besar kecilnya unsur perencanaan, koordinasi dan pengawasan yang ada dalam setiap institusi. Jika misalnya, dibandingkan antara Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) dengan Badan Pengawasan Daerah (Bawasda), maka rentang perencanaan Bapeda akan lebih besar dari pada Bawasda. Sebaliknya, rentang pengawasan Bawasda lebih besar dari pada Bapeda.

Kegiatan Ekonomi Masyarakat

Beberapa institusi memiliki fungsi sebagai penggerak perekonomian masyarakat. Biasanya dinas/badan/kantor semacam ini mempunyai tugas untuk menggerakkan suatu sektor ekonomi tertentu dalam masyarakat. Pada giliran selanjutnya sektor ekonomi tersebut mendorong sektor ekonomi lain yang berada di sebelah hulu dan hilirnya, serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja. Misalnya, Dinas Perindustrian melakukan pembinaan pada industri tekstil sehingga jumlah produksi tekstil mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan produksi tekstil ini berakibat pada naiknya jumlah produksi benang. Inilah contoh keterkaitan ke belakang (*backward*). Kenaikan produksi tekstil juga berakibat pada kenaikan produksi pakaian jadi, ini merupakan contoh keterkaitan ke depan (*forward*).

Di sisi faktor produksi, kenaikan produksi tekstil akan menaikkan penyerapan tenaga kerja produksi. Ini merupakan contoh terjadinya penggandaan tenaga kerja. Dengan tambahan penyerapan tenaga kerja tersebut, kenaikan produksi tekstil meningkatkan pula tingkat pendapatan rumah tangga. Hal ini menunjukkan terjadinya penggandaan pendapatan masyarakat. Besarnya keterkaitan ke depan dan belakang serta penggandaan tenaga kerja dan pendapatan di atas dapat dihitung dengan menggunakan model input-output dan ini merupakan variabel-variabel yang digunakan untuk mengukur pengaruh suatu institusi terhadap kegiatan ekonomi masyarakat.

Dari penjelasan bagian di atas dapat dirangkum variabel-variabel penentu alokasi anggaran. Dari empat faktor yang dipertimbangkan, pada akhirnya ditemukan 9 variabel penentu alokasi anggaran. Pada tabel 1 di bawah ini dirangkum hasil perumusan variabel-variabel tersebut beserta sumber data yang dijadikan acuan.

Tabel 1. Variabel Penentu Alokasi Anggaran

Faktor yang dipertimbangkan	Variabel yang dipakai	Sumber data
Input yang harus ada	1. Jumlah pegawai 2. Nilai aset SKPD	- Tupoksi - Data historis
Jumlah pelayanan kepada masyarakat (Fungsi Sosial)	3. Jumlah pelayanan 4. Sumbangan PAD	- Tupoksi - Data historis pelayanan
Rentang Manajerial	5. Rentang manajerial	- Tupoksi - Data historis
Pengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat	6. Keterkaitan ke depan 7. Keterkaitan ke belakang 8. Pengganda Tenaga Kerja 9. Pengganda Pendapatan	- Model input output - Tupoksi

Perhitungan Alokasi Anggaran

Sementara itu, variabel-variabel penentu anggaran yang diperoleh secara teoretis di atas, selanjutnya diolah untuk mendapatkan angka proporsi anggaran

yang dialokasikan kepada setiap institusi. Jika tabel 1 diperhatikan lebih cermat, faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan alokasi anggaran dapat dikelompokkan lagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu: (1) faktor yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi (variabel no. 6–9), selanjutnya disebut faktor ekonomi, sedangkan variabel-variabel di dalamnya disebut variabel ekonomi; (2) faktor yang tidak berkaitan dengan kegiatan ekonomi (variabel no.1–5), selanjutnya disebut faktor non ekonomi, sedangkan variabel-variabel di dalamnya disebut variabel non ekonomi.

Variabel-variabel dalam setiap faktor tersebut memiliki satuan yang berbeda-beda. Untuk variabel-variabel ekonomi, angkanya diperoleh dari pendekatan model input-output dalam bentuk koefisien⁷. Untuk variabel-variabel non ekonomi, satuan yang digunakan cukup beraneka ragam. Satuan jumlah pegawai berbeda dengan satuan luas bangunan, berbeda dengan satuan PAD, dan seterusnya. Untuk menyamakan satuan-satuan yang berbeda-beda tersebut, baik dalam faktor ekonomi maupun non ekonomi, maka setiap nilai harus dijadikan indeks.

Dari masing-masing indikator untuk variable-variabel tersebut, koefisien alokasi anggaran diformulasikan total indikator sebagai berikut:

$$I_{total} = \sum Ie_i * be_i + \sum In_i * bn_i$$

dimana:

I_{total} = Indeks total (koefisien alokasi anggaran)

Ie_i = Indeks Variabel ekonomi ke-i

be_i = bobot variable ekonomi ke-i

In_i = Indeks Variabel non ekonomi ke-i

bn_i = bobot variable non ekonomi ke-i.

Dari hasil penghitungan tersebut kemudian disesuaikan dengan berdasarkan pertimbangan untuk *balancing* dengan alokasi anggaran SKPD lain.

D. SIMULASI ALOKASI ANGGARAN

Berdasarkan hasil penghitungan indeks koefisien alokasi anggaran pada tabel 2b menunjukkan bahwa SKPD yang paling besar memperoleh porsi paling besar dari penghitungan adalah Dinas Pendidikan Nasional, yaitu sebesar 17,35% dari APBD. Dinas ini dari hasil penghitungan mempunyai pelayanan sosial yang cukup besar kepada masyarakat.

Kemudian SKPD yang juga memperoleh bagian cukup besar adalah Dinas Kelautan dan Perikanan, yaitu sebesar 12,08%. Hal ini berkaitan dengan potensi

⁷ Badan Pusat Statistik (berbagai publikasi). Tabel *Input-Output* Indonesia, Jakarta.

ekonomi dan kegiatan masyarakat, serta kemampuan multiplier sektor tersebut yang bisa dikembangkan untuk mendorong perekonomian dan pendapatan masyarakat.

SKPD berikutnya yang mempunyai porsi tinggi adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset, serta Dinas Pekerjaan Umum. Ketiga SKPD ini masing-masing memperoleh porsi sebesar 12,02 %, 11,00% dan 10,79%. Dinas Pertanian dan Kehutanan mempunyai bagian besar karena dapat meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat Kabupaten Selayar. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset memperoleh bagian besar lebih pada perannya dalam upaya meningkatkan PAD dan merawat aset-aset yang dimiliki daerah. Dan Dinas Pekerjaan Umum mempunyai bagian besar karena mempunyai peran meningkatkan infrastruktur daerah guna mendorong perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. SKPD-SKPD lainnya mempunyai bagian yang relatif kecil.

Dalam tabel 3 dapat diketahui hasil perbandingan penghitungan alokasi dengan realisasi APBD 2011. Dengan membandingkan realisasi anggaran dan simulasi penghitungan alokasi anggaran diperoleh perbedaan yang cukup mencolok pada 15 SKPD dari 52 SKPD (sekitar 28,85%), 8 SKPD diantaranya Biro di Sekretariat Daerah. Selisih hasil penghitungan dengan realisis lebih dari 100%, yakni :

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Dinas Koperasi, UKM, Perindag., Pertambangan dan Energi
- Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Sekretariat Daerah (bagian Hukum)
- Sekretariat Daerah (bagian Ekonomi)
- Sekretariat Daerah (bagian Pembangunan)
- Sekretariat Daerah (bagian Umum)
- Sekretariat Daerah (bagian Organisasi dan Kepegawaian)
- Sekretariat Daerah (bagian Keuangan)
- Sekretariat Daerah (bagian Pemuda dan Olah Raga)
- Sekretariat Daerah (Humas, Protokol dan PDE)
- Dinas Pertanian dan Kehutanan
- Dinas kelautan dan Perikanan

Melihat hasil tersebut, maka untuk implementasinya perlu dilakukan diskusi lebih mendalam agar dapat memperoleh hasil yang optimal. Dengan menggunakan metode koefisien alokasi anggaran, maka rencana penetapan pagu anggaran pemerintah Kabupaten Selayar secara metodologis lebih objektif,

sehingga diharapkan akan lebih efektif dan efisien dalam penerapannya, serta dapat mengurangi intervensi pihak lain. Metodologi pengalokasian anggaran ini bersifat fleksibel, dapat mengakomodir kesepakatan strategis yang dibuat oleh pihak eksekutif dan legislatif pada bidang kewenangan maupun sektor tertentu.

Tabel 2a. Penghitungan Indeks Koefisien Alokasi Anggaran

NO. Urut	URAIAN	Pengganda Ekonomi				Pelayanan	Sumbangan	Fungsi	Jumlah
		Backward	Forward	Tenaga kerja	Pendapatan	Masyarakat	PAD	Manajerial	Pegawai
1	Dinas Pendidikan Nasional	-	-	20,76	11,74	60,77	-	6,43	24,88
2	Dinas Kesehatan	-	-	10,04	4,64	12,71	3,76	3,07	2,80
3	Rumah Sakit Umum Daerah	-	-	-	-	6,17	5,97	2,37	4,32
4	Dinas Pekerjaan Umum Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	29,86	19,94	23,47	12,53	-	4,09	2,71	3,29
5	Dinas Perhubungan dan Kominfo	-	-	-	-	-	-	2,37	2,16
6	Kantor Lingkungan Hidup	2,59	1,66	-	-	-	3,66	1,35	2,06
7	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	-	-	-	-	0,11	-	1,35	1,03
8	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	-	-	-	-	3,04	2,48	1,02	1,65
9	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-	-	4,05	1,62	1,35	1,85
10	Dinas Koperasi, UKM, Perindang, Pertambangan dan Energi	-	-	16,95	21,27	-	-	1,69	1,54
11	Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal	-	-	-	-	-	4,89	1,13	1,03
12	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas	-	-	-	14,57	-	1,90	1,13	0,93
13	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	0,06	-	1,02	0,93
14	Badan penanggulangan Bencana daerah	-	-	-	-	0,91	-	1,02	2,16
15	DPRD	-	-	-	-	0,12	-	1,02	1,13
16	Bupati dan Wakil Bupati	-	-	-	-	0,10	-	1,02	2,78
17	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	3,72	0,83
18	Sekretariat Daerah (Bagian Tata Pemerintahan)	-	-	-	-	-	4,60	17,60	2,16
19	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)	-	-	-	-	-	-	1,35	1,44
20	Sekretariat Daerah (Bagian Ekonomi)	-	-	-	-	-	-	1,35	1,54
21	Sekretariat Daerah (Bagian Pembangunan)	-	-	-	-	-	-	1,35	1,44
22	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)	-	-	-	-	-	-	1,35	1,42
23	Sekretariat Daerah (Bagian Kesra)	-	-	-	-	-	-	1,35	1,91
24	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi dan Kepegawaian)	-	-	-	-	-	-	1,35	1,27
25	Sekretariat Daerah (Bagian Keuangan)	-	-	-	-	-	-	1,35	1,34
26	Sekretariat Daerah (Bagian Pemuda dan Olah Raga)	-	-	-	-	-	-	1,35	1,44
27	Sekretariat Daerah (Bagian Perlengkapan)	-	-	-	-	-	-	1,35	1,44
28	Sekretariat Daerah (Bagian Humas, Protokol, dan PDE)	-	-	-	-	-	-	1,35	1,42
29	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	1,35	1,34
30	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	-	-	-	-	0,06	62,67	1,35	1,75
31	Inspektorat Daerah	-	-	-	-	-	-	1,02	1,15
32	Kecamatan Bontomatene	-	-	-	-	0,21	-	1,69	1,75
33	Kecamatan Buki	-	-	-	-	0,10	-	1,69	1,44
34	Kecamatan Bontomanai	-	-	-	-	0,17	-	1,69	1,23
35	Kecamatan Benteng	-	-	-	-	0,05	-	1,69	0,93
36	Kecamatan Bontoharu	-	-	-	-	0,17	-	1,69	1,23

40	Kecamatan Bontosikuyu	-	-	-	-	0,18	-	1,69	1,34
41	Kecamatan Takabonerate	-	-	-	-	0,11	-	1,69	0,82
42	Kecamatan Pasimasunggu	-	-	-	-	0,09	-	1,69	0,82
43	Kecamatan Pasimasunggu Timur	-	-	-	-	0,08	-	1,69	0,72
44	Kecamatan Pasimarannu	-	-	-	-	0,05	-	1,69	0,76
45	Kecamatan Pasilambena	-	-	-	-	0,07	-	1,69	0,72
46	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	-	-	-	-	0,05	-	1,02	0,51
47	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-	2,20	-	1,47	1,34
48	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan/Kelurahan	-	-	-	-	0,11	-	1,24	1,13
49	Kantor Perpustakaan dan Arsip	-	-	-	-	0,08	0,81	1,13	1,03
50	Dinas Pertanian dan Kehutanan	20,12	41,56	16,86	27,86	-	-	1,35	1,54
51	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan	-	-	-	-	0,12	-	1,13	1,03
52	Dinas kelautan dan Perikanan	47,43	36,84	11,91	7,39	-	2,29	1,69	1,03
	Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Tabel 2b. Indeks Hasil Penghitungan Koefisien Alokasi Anggaran SKPD
Kabupaten Selayar (dalam persentase)**

NO. Urut	URAIAN	Total Indikator
1	Dinas Pendidikan Nasional	17,35
2	Dinas Kesehatan	5,06
3	Rumah Sakit Umum Daerah	2,80
4	Dinas Pekerjaan Umum	10,79
5	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	0,50
6	Dinas Perhubungan dan Kominfo	1,46
7	Kantor Lingkungan Hidup	0,28
8	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	1,23
9	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil	1,32
10	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	0,32
11	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1,89
12	Dinas Koperasi, UKM, Perindang, Pertambangan dan Energi	4,56
13	Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal	1,07
14	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2,15
15	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas	0,22
16	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	0,50
17	Badan penanggulangan Bencana daerah	0,26
18	DPRD	0,43
19	Bupati dan Wakil Bupati	0,50
20	Sekretariat Daerah	2,96
21	Sekretariat Daerah (Bagian Tata Pemerintahan)	0,31
22	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)	0,32
23	Sekretariat Daerah (Bagian Ekonomi)	0,31
24	Sekretariat Daerah (Bagian Pembangunan)	0,31
25	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)	0,36
26	Sekretariat Daerah (Bagian Kesra)	0,29
27	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi dan Kepegawaian)	0,30

28	Sekretariat Daerah (Bagian Keuangan)	0,31
29	Sekretariat Daerah (Bagian Pemuda dan Olah Raga)	0,26
30	Sekretariat Daerah (Bagian Perlengkapan)	0,35
31	Sekretariat Daerah (Bagian Humas, Protokol, dan PDE)	0,29
32	Sekretariat DPRD	0,26
33	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	11,00
34	Inspektorat Daerah	0,24
35	Kecamatan Bontomatene	0,41
36	Kecamatan Buki	0,36
37	Kecamatan Bontomanai	0,35
38	Kecamatan Benteng	0,30
39	Kecamatan Bontoharu	0,35
40	Kecamatan Bontosikuyu	0,36
41	Kecamatan Takabonerate	0,30
42	Kecamatan Pasimasunggu	0,29
43	Kecamatan Pasimasunggu Timur	0,28
44	Kecamatan Pasimarannu	0,28
45	Kecamatan Pasilambena	0,28
46	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	0,18
47	Badan Kepegawaian Daerah	0,68
48	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan/Kelurahan	0,28
49	Kantor Perpustakaan dan Arsip	0,39
50	Dinas Pertanian dan Kehutanan	12,02
51	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanakan Penyuluhan	0,26
52	Dinas kelautan dan Perikanan	12,08
	Jumlah	100,00

Tabel 3. Perbandingan hasil Simulasi dan Realisasi APBD 2010

NOMOR URUT	URAIAN	Hasil Simulasi	Realisasi APBD 2011	Perbedaan (%)
1	Dinas Pendidikan Nasional	81.789.678.780	126.703.044.000	(35,45)
2	Dinas Kesehatan	23.852.075.290	23.548.649.000	1,29
3	Rumah Sakit Umum Daerah	13.198.211.797	15.713.213.000	(16,01)
4	Dinas Pekerjaan Umum	50.884.359.536	42.076.972.000	20,93
5	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	2.348.392.560	5.157.197.000	(54,46)
6	Dinas Perhubungan dan Kominfo	6.903.245.535	6.102.011.000	13,13
7	Kantor Lingkungan Hidup	1.325.426.474	2.470.553.000	(46,35)
8	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	5.805.879.899	3.981.594.000	45,82
9	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil	6.203.256.977	2.194.295.000	182,70
10	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	1.508.388.287	3.486.538.000	(56,74)
11	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8.905.174.533	5.042.009.000	76,62
12	Dinas Koperasi, UKM, Perindang, Pertambangan dan Energi	21.492.558.687	6.592.301.000	226,03
13	Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal	5.038.461.394	940.181.000	435,90
14	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	10.141.412.231	4.050.620.000	150,37
15	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas	1.051.511.825	1.184.569.000	(11,23)

16	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	2.376.700.101	2.416.568.000	(1,65)
17	Badan penanggulangan Bencana daerah	1.207.917.500	2.100.963.000	(42,51)
18	DPRD	2.048.252.031	4.127.342.000	(50,37)
19	Bupati dan Wakil Bupati	2.359.702.990	416.558.000	466,48
20	Sekretariat Daerah	13.931.858.247	15.497.656.000	(10,10)
21	Sekretariat Daerah (Bagian Tata Pemerintahan)	1.448.566.479	2.375.000.000	(39,01)
22	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)	1.501.880.416	665.000.000	125,85
23	Sekretariat Daerah (Bagian Ekonomi)	1.448.566.479	289.927.000	399,63
24	Sekretariat Daerah (Bagian Pembangunan)	1.437.903.692	462.000.000	211,23
25	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)	1.693.810.588	255.000.000	564,24
26	Sekretariat Daerah (Bagian Kesra)	1.363.264.180	1.041.000.000	30,96
27	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi dan Kepegawaian)	1.395.252.542	255.000.000	447,16
28	Sekretariat Daerah (Bagian Keuangan)	1.448.566.479	165.000.000	777,92
29	Sekretariat Daerah (Bagian Pemuda dan Olah Raga)	1.203.322.370	200.000.000	501,66
30	Sekretariat Daerah (Bagian Perlengkapan)	1.661.822.226	8.587.500.000	(80,65)
31	Sekretariat Daerah (Bagian Humas, Protokol, dan PDE)	1.373.926.968	643.309.000	113,57
32	Sekretariat DPRD	1.219.709.701	9.550.911.000	(87,23)
33	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	51.877.789.601	73.640.756.000	(29,55)
34	Inspektorat Daerah	1.123.744.615	2.831.450.000	(60,31)
35	Kecamatan Bontomatene	1.952.701.957	10.079.120.000	(80,63)
36	Kecamatan Buki	1.701.560.357	4.628.725.000	(63,24)
37	Kecamatan Bontomanai	1.654.499.919	8.188.668.000	(79,80)
38	Kecamatan Benteng	1.394.875.931	2.231.338.000	(37,49)
39	Kecamatan Bontoharu	1.656.769.358	8.324.297.000	(80,10)
40	Kecamatan Bontosikuyu	1.713.096.250	8.504.361.000	(79,86)
41	Kecamatan Takabonerate	1.395.726.861	5.468.406.000	(74,48)
42	Kecamatan Pasimasunggu	1.379.198.541	4.480.620.000	(69,22)
43	Kecamatan Pasimasunggu Timur	1.312.898.561	3.704.532.000	(64,56)
44	Kecamatan Pasimarannu	1.311.531.156	2.348.326.000	(44,15)
45	Kecamatan Pasilambena	1.308.332.811	3.431.668.000	(61,87)
46	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	832.628.869	423.211.000	96,74
47	Badan Kepegawaian Daerah	3.216.981.090	4.804.932.000	(33,05)
48	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan/Kelurahan	1.320.472.324	2.108.596.000	(37,38)
49	Kantor Perpustakaan dan Arsip	1.838.181.001	1.524.630.000	20,57
50	Dinas Pertanian dan Kehutanan	56.674.926.014	11.548.327.000	390,76
51	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanan Penyuluhan	1.217.680.300	5.092.009.000	(76,09)
52	Dinas kelautan dan Perikanan	56.959.667.689	9.755.868.000	483,85
	Jumlah	471.412.320.000	471.412.320.000	-

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penghitungan indeks koefisien alokasi anggaran, SKPD yang paling besar memperoleh porsi paling besar dari penghitungan adalah Dinas Pendidikan, yaitu sebesar 17,35% dari APBD. Dinas Pendidikan bertanggungjawab pada pelayanan umum dibidang pendidikan dan

pengembangan Sumberdaya Manusia. Berikutnya adalah Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar 12,08 %, karena potensi ekonomi dan kemampuan sektor tersebut mendorong perekonomian dan pendapatan masyarakat. Selanjutnya Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dan Dinas Pekerjaan Umum (masing-masing sebesar 12,02 %, 11,00 % dan 10,79 %). Sementara, SKPD-SKPD lainnya mempunyai bagian yang relatif kecil.

Dengan membandingkan simulasi penghitungan berdasarkan indikator (koefisien alokasi anggaran) dan realisasi anggaran tahun 2011 diperoleh perbedaan yang cukup mencolok, yaitu ada 15 SKPD dari 52 SKPD (sekitar 28,85%), 8 SKPD diantaranya Biro di Sekretariat Daerah, dengan selisih lebih dari 100%.

Sementara itu, agar metode alokasi anggaran yang dibuat dengan berdasarkan koefisien alokasi anggaran ini dapat berlaku secara efektif, maka perlu untuk dimasukkan dalam bentuk peraturan daerah atau peraturan kepala daerah (Bupati Selayar), meskipun metodologi pengalokasian anggaran ini bersifat fleksibel.

F. REKOMENDASI KEBIJAKAN

Di bawah ini rekomendasi kebijakan dalam proses pengelolaan alokasi anggaran yang perlu diperhatikan untuk program unggulan bagi Pemerintah Kabupaten Selayar 2011-2015:

- Perumusan kebijakan alokasi anggaran dalam bentuk peraturan daerah atau peraturan kepala daerah (Bupati Selayar) berdasarkan metode alokasi anggaran yang dibuat dengan berdasarkan koefisien alokasi anggaran ini dapat berlaku secara efektif.
- Perumusan kebijakan alokasi anggaran pembangunan untuk sektor aparatur pemerintah dan pengawasan perlu didasarkan pada analisis kebutuhan fungsional secara transparan.
- Perumusan kebijakan alokasi anggaran pembangunan perlu diperkuat oleh tim analisis kebijakan keuangan daerah, yang terdiri atas unsur konsultan keuangan dan konsultan ekonomi pembangunan dari berbagai perguruan tinggi.
- Perlu dilakukan survei terhadap potensi sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Selayar dengan melibatkan tenaga-tenaga profesional dari berbagai perguruan tinggi, dan hasilnya disosialisasikan ke seluruh pihak yang berkepentingan.

KEPUSTAKAAN

- Badan Pusat Statistik (berbagai publikasi). *Tabel Input-Output Indonesia*, Jakarta.
- Musgrave, Richard A & Peggy Musgrave. 1989. *Public Finance in Theory and Practice*. New York, McGraw Hill, 5th edition.
- Sullivan, A. 2000. *Urban Economics*, Boston:Irwin McGraw-Hill.
- Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Jakarta.
- Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Jakarta.
- United Nations. 1999. Handbook of Input-Output Table Compilation and Analysis. Studies in Methods Series F, No. 74, New York.
- Wildavsky, Aaron. 1961. "Political Implications of Budgetary Reform." *Public Administration Review*, 21 (Autumn): 183-190.